

**SEKURITISASI EKOSISTEM GAMBUT SUMATERA SELATAN OLEH
NGO : WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA 2014-2016**

Wahyu Saputra¹, Hoirun Nisyak², Nur Aslamiah Supli³

¹²³*Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia*

SUBMISSION TRACK

Received: 16 Maret 2021
Final Revision: 30 April 2021
Available Online: 30 Juni 2021

KEYWORD

*Securitization, Peat Ecosystem,
South Sumatra, WALHI*

ABSTRACT

The peat ecosystem that functions and plays an important role in controlling and regulating global warming is one of the unique ecosystems that must be protected and Indonesia has become one of the largest peatland countries in the world. However, the fact is that there is degradation of the peat ecosystem in Indonesia due to the conversion of peatlands and causing forest and land fires. As a result, the country experiences losses and the country's security and stability are threatened. One of the provinces with the greatest damage and losses was in South Sumatra. This condition is of concern to the NGO, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, to protect the peatland ecosystem in South Sumatra by raising it as a security issue. This research will analyze the protection and preservation of the peatland ecosystem in South Sumatra carried out by Wahana Lingkungan Hidup Indonesia through securitization efforts. In analyzing these securitization efforts, the author will look at securitization actors, built speech act, future threat, target audience, extraordinary measure and the results of securitization in the form of policies or political decisions. In addition, this research will be limited throughout 2014-2016 by looking at the ecological disasters that occurred and the emergence of the issue of the peat ecosystem to the public's attention.

KATA KUNCI

Sekuritisasi, Ekosistem Gambut,
Sumatera Selatan, WALHI

CORRESPONDENCE

Email : wahyusptr1996@gmail.com

ABSTRAK

Ekosistem gambut yang berfungsi dan berperan penting dalam pengendalian dan pengatur pemanasan global menjadi salah satu ekosistem unik yang harus dilindungi dan Indonesia menjadi salah satu negara terbesar luasan gambut di Dunia. Namun faktanya terjadi degradasi ekosistem gambut di Indonesia yang diakibatkan alihfungsi lahan gambut dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Akibatnya negara mengalami kerugian dan keamanan dan stabilitas negara terancam. Salah satu provinsi dengan kerusakan dan kerugian terbesar berada di Sumatera Selatan. Kondisi ini menjadi perhatian NGO yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia untuk melindungi ekosistem gambut di Sumatera Selatan dengan mengangkatnya sebagai isu keamanan. Penelitian ini akan menganalisis tentang perlindungan dan pelestarian ekosistem gambut di Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melalui upaya sekuritisasi. Dalam menganalisis upaya sekuritisasi tersebut, peneliti akan melihat aktor sekuritisasi, speech act yang dibangun, ancaman dimasa depan, target audience, tindakan darurat yang dilakukan dan hasil dari sekuritisasi berupa kebijakan atau keputusan politik. Penelitian ini akan dibatasi sepanjang 2014-2016 dengan melihat bencana ekologis yang terjadi dan awal kemunculan isu ekosistem gambut menjadi perhatian publik.

PENDAHULUAN

Pemanasan global menjadi salah satu isu penting yang diangkat dalam kajian internasional karena dianggap sebagai ancaman serius bagi kelangsungan spesies dan ekosistem di seluruh dunia (Hulme 2005). Sejak revolusi industri 1980an, jumlah gas karbon dioksida yang awalnya sebesar 1 GtC di tahun 2018 kini mencapai 37,1 GtC dan menaikkan jumlah suhu bumi sebesar 1,5% (Quere, Hawtin and Vuuren 2018). Diperkirakan pada tahun 2100 temperatur atmosfer akan mencapai kenaikan 1,5-4,5° Celsius yang mengakibatkan punahnya berbagai jenis keanekaragaman hayati, kenaikan permukaan air laut sekitar 15-95 cm dan banjir yang luas akibat mencairnya es dan gletser kutub, meningkatkan intensitas dan frekuensi hujan badai dan angin topan, kekeringan berkepanjangan yang menyebabkan kebakaran hutan serta berbagai penyakit akibat perubahan iklim secara drastis (Sayyidati 2016).

Ekosistem gambut merupakan salah satu ekosistem penting dalam upaya pengendalian pemanasan global. Dengan luasan yang hanya sebesar 3% daratan di dunia ternyata mampu menyerap dan menyimpan 550 GtC atau 30% karbon di dunia (Gambut 2020). Dalam kondisi alami, ekosistem gambut yang terjaga dapat meningkatkan kemampuannya dalam

menyerap karbon, namun jika terganggu maka dapat menjadi sumber meningkatnya karbon, bahkan menjadi sumber dari metana dan dinitrogen oksida (Murdiyarto dan Suryadiputra 2001). Saat ini luasan gambut di dunia adalah sebesar 170 Juta Hektar dengan sebaran di 168 Negara. Brazil menempati peringkat pertama dengan 31 Juta Hektar, diikuti Indonesia sebesar 22,4 Juta Hektar dan Republik Congo sebesar 11,5 Juta Hektar (Cifor 2020). Indonesia sendiri memiliki kawasan ekosistem gambut terbesar kedua di dunia dengan luasan 22,4 juta hektar yang mampu menyimpan sekitar 57 GtC gas karbon dioksida sumber pemanasan global. Secara umum, ekosistem gambut Indonesia memiliki fungsi dan manfaat antara lain sebagai penyerap karbon, sebagai penyangga dan tata kelola air, sebagai habitat flora dan fauna, dan sumber mata pencaharian masyarakat di sekitar ekosistem gambut (Ramadhan 2017).

Namun dengan peran dan fungsi dari ekosistem gambut tersebut tidak diimbangi dengan upaya perlindungan dan pengelolaan yang baik. Dapat dilihat dari banyaknya alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit dan perkebunan akasia yang mengakibatkan terjadinya degradasi ekosistem gambut. Data menunjukkan dalam rentang tahun 2005-2015 terdapat 6,3 juta hektar lahan gambut yang sudah

memiliki izin usaha (Triyono dan Vebri 2015) dan melakukan aktivitas pembuatan sekat kanal yang menyebabkan gambut menjadi kering. Akibatnya terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2015 dengan luasan kebakaran mencapai 2,61 Juta hektar yang tersebar di 31 Provinsi yang tersebar di Sumatera selatan yaitu 646.298,80 Ha, disusul Kalimantan Tengah 583.833,44 Ha dan Papua 350.005,30 Ha (Sipongi 2020). Kebakaran hutan dan lahan 2015 ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah di Indonesia dan telah melepaskan emisi karbon sebesar 1 miliar ton gas ke udara (Linggasari 2015). Selain itu kebakaran hutan dan lahan juga menyebabkan kerugian negara mencapai 16 USD, krisis kesehatan, terganggunya aktivitas dan mengancam keamanan negara (World Bank Group 2015). Sumatera Selatan menjadi provinsi penyumbang kebakaran hutan dan lahan terbesar dengan luasan 646.298,80 Ha dan mengalami kerusakan ekosistem gambut terbesar mencapai 98% (KLHK 2018). Kondisi ini menurut Hadi Jatmiko selaku Direktur Eksekutif WALHI Daerah Sumatera Selatan 2014-2018, diakibatkan oleh banyaknya alih fungsi lahan gambut dengan adanya 4416 titik api di 63 perusahaan di Sumatera Selatan (Nugraha 2015).

Berdasarkan fakta di atas, diperlukan upaya sekuritisasi dengan melihat fungsi dan peran ekosistem gambut bagi lingkungan khususnya pemanasan global. Posisi sebagai aktor sekuritisasi kemudian diambil oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai organisasi lingkungan tertua dan terbesar di Indonesia (WALHI 2020). Dalam pandangan WALHI, ekosistem gambut mempunyai peran ganda jika dimanfaatkan dengan bijaksana, maka akan menjadi pengatur dan pengendali pemanasan global, penyangga tata kelola air dan mencegah kebakaran hutan dan lahan karena memiliki kandungan air yang banyak, sebaliknya jika lahan gambut mengalami kerusakan maka dampaknya adalah sebagai sumber kebakaran hutan yang mengakibatkan tingginya gas karbon sehingga memperbesar emisi karbon yang berdampak pada pemanasan global (Sobri, 2020).

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana upaya sekuritisasi ekosistem gambut di Sumatera Selatan yang dilakukan oleh WALHI sebagai aktor sekuritisasi dengan melihat berbagai ketimpangan pengelolaan, kerusakan dan dampak buruk yang dirasakan akibat rusaknya ekosistem gambut di Sumatera Selatan. Penelitian ini berfokus pada

rentang tahun 2014-2016 dengan melihat bencana besar yang terjadi akibat rusaknya ekosistem gambut dan awal kemunculan isu ekosistem gambut menjadi perhatian publik. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan inilah, yang menjadi dasar rumusan masalah yaitu “ Bagaimana sekuritisasi ekosistem gambut di Sumatera Selatan yang dilakukan NGO : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dalam rentang tahun 2014-2016 “

KERANGKA KONSEP

Sekuritisasi

Buzan mengemukakan bahwa isu keamanan dapat dilihat dari cabang politik sehingga isu keamanan memiliki kebutuhan dalam memperluas agenda keamanannya yang berpotensi menjadi ancaman di dalam lima aspek antara lain sektor militer, sektor politik, sektor ekonomi, sektor sosial, dan sektor lingkungan. Buzan menjelaskan bahwa Negara tidak lagi satu-satunya aktor yang terlibat dalam isu keamanan, melainkan berbagai aktor seperti organisasi internasional, non-governmental organizations (NGO), kelompok kepentingan, perusahaan multi-nasional dan trans-nasional, partai politik, kaum-kaum minoritas dan individu. Sehingga menghasilkan beberapa teori keamanan

salah satunya teori sekuritisasi. Kemunculan teori sekuritisasi muncul atas kajian yang dipelopori oleh Barry Buzan, Ole Weaver dan beberapa pemikir yang dikelompokkan sebagai pemikir Copenhagen School. (Barry Buzan 1998). Dalam pandangan Weaver sekuritisasi merupakan sebuah upaya dalam mengangkat suatu isu yang sebelumnya tidak di perhitungkan menjadi isu penting yang berpengaruh dan berdampak besar terhadap keamanan. Sebuah isu dapat dikategorikan sebagai isu keamanan pada dasarnya isu tersebut dianggap penting dan dipandang mengancam secara nyata dan yang terjadi sehingga membutuhkan prioritas dalam penanganannya. Namun, isu keamanan juga muncul bukan hanya karena mengancam secara nyata, tetapi memang sengaja dimunculkan sebagai isu yang akan mengancam. Dalam teori sekuritisasi, isu yang semula tidak membutuhkan keputusan politik karena dianggap tidak penting, kemudian disuarakan oleh securitizing actors menjadi isu politik yang harus diselesaikan dengan keputusan politik atau kebijakan dan alokasi sumber daya karena isu tersebut menjadi isu penting dan genting dalam keamanan (Barry Buzan 1998).

Inti teori sekuritisasi dalam kajian hubungan internasional adalah masalah

keamanan bukan hanya berfokus kepada ancaman militer atau ancaman untuk negara, tetapi masalah keamanan dapat ditafsirkan sebagai ancaman karena adanya aktor yang mendefinisikannya. Aktor tersebut kemudian merasa mampu untuk menangani masalah tersebut untuk menjamin keselamatan objek yang terancam dan dianggap sebagai isu keamanan. Keberhasilan proses sekuritisasi ini sangat ditentukan oleh argumentasi atau speech act yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi dan seberapa besar argumentasi tersebut diterima oleh audience yang menjadi target.

Dalam pandangan Ozcan, terdapat indikator atau proses dalam sekuritisasi antara lain (1) adanya aktor sekuritisasi (2) speech act yaitu membingkai isu dalam keadaan terancam (existential threat) sehingga diperlukan urgensi untuk diselamatkan (3) target audience agar terpengaruh bahwa isu yang diangkat benar-benar terancam dan menjadi referent object dalam isu keamanan (4) extraordinary measure atau tindakan darurat yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi guna menyelamatkan referent object dalam isu keamanan (Özcan 2013). Proses sekuritisasi dapat dikatakan berhasil dengan melihat seberapa mampu aktor sekuritisasi dalam membingkai isu tersebut

sehingga terbangun argumentasi bahwa terjadi ancaman referent object dan meyakinkan target audience isu tersebut harus mendapat penanganan yang cepat dan darurat. Faktor terpenting dalam keberhasilan sekuritisasi adalah persetujuan atau semacam dukungan dari target audience atas dilakukannya suatu tindakan mendesak yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi dalam menyelamatkan referent object dari ancaman (Hadiwinata 2017). Di samping itu adanya extraordinary measure atau tindakan darurat yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi penting dan di perlukan, namun bukanlah faktor terpenting dalam keberhasilan sekuritisasi. Sehingga, selama aktor sekuritisasi tidak melakukan tindakan mendesak dan cepat, namun melakukan speech act mendorong isu tersebut, selama target audience menyetujui tindakan tersebut, maka sekuritisasi dapat dikatakan berhasil (Özcan 2013).

Dalam keberhasilan sekuritisasi, terdapat tiga faktor yang mendukung keberhasilan sekuritisasi antara lain (1) Penggunaan bahasa yang tepat dalam speech act (2) Kekuatan sosial yang dimiliki oleh aktor sekuritisasi (3) Kemampuan aktor sekuritisasi dalam menjelaskan dan menyampaikan adanya

ancaman serius terhadap referent object kepada target audience (Andika 2013).

Sedangkan yang dimaksudkan speech act dalam sekuritisasi adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh securitizing actors dalam menginisiasi proses sekuritisasi. Ancaman serius dalam speech act dimunculkan atas wacana yang disuarakan oleh securitizing actors yang dianggap mengancam apa yang disebut sebagai referent object dalam konteks keamanan. Target audience yang dimaksud dalam proses sekuritisasi adalah pihak yang menjadi sasaran speech act dengan tujuan dipengaruhi dan mempercayai adanya ancaman serius terhadap referent object yang dilakukan oleh securitizing actors (Ramadhannanda 2017).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan mendeskripsikan dan menjelaskan peristiwa, keadaan yang menjadi topik penelitian berdasarkan fakta. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari library research, melalui data yang diperoleh dari buku, jurnal, dokumen, artikel, karya ilmiah, dan beberapa sumber lainnya, dengan metode analisis data yaitu metode analisis

kualitatif dengan melakukan analisis data sekunder yang penulis dapatkan untuk dapat menunjang penelitian ini. Hasil dari analisis data yang dilakukan penulis akan disimpulkan untuk memberikan jawaban dari topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aktor Sekuritisasi

Aktor sekuritisasi pada dasarnya adalah orang atau kelompok yang memiliki kekuatan untuk meyakinkan audience akan adanya ancaman terhadap suatu isu dimasa depan. Posisi inilah yang diambil oleh WALHI sebagai salah satu kelompok kepentingan mewakili NGO yang memiliki kapasitas sebagai aktor sekuritisasi dalam isu ekosistem gambut di Sumatera Selatan dengan memperhatikan latar belakang organisasi tersebut.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau yang di singkat WALHI merupakan organisasi lingkungan terbesar dan tertua di Indonesia yang berdiri sejak 1980. WALHI juga merupakan anggota dari Friends of The Earth Internasional (FoEI) sebuah jaringan organisasi lingkungan hidup internasional di 74 negara (FoEI 2020). WALHI merupakan organisasi lingkungan hidup berbentuk forum lingkungan hidup yang memiliki anggota sebanyak 487 organisasi dari

unsur organisasi non pemerintah dan organisasi pencinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia (WALHI 2020).

Dalam kaitannya dengan aktor sekuritisasi, pihak yang berperan sebagai representasi dari WALHI diperankan oleh beberapa orang antara lain (1) Direktur Eksekutif Nasional WALHI sebagai pimpinan pusat mempunyai kewenangan sebagai orang yang mewakili WALHI dalam advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia baik tingkat nasional maupun internasional (2) Manajer Kampanye Pangan, Air dan Ekosistem Esensial, WALHI Nasional yang menjalankan kajian dan aksi terkait dengan isu-isu pangan, air dan ekosistem esensial yang salah satunya adalah ekosistem gambut (3) Direktur Eksekutif Daerah Sumatera Selatan sebagai pimpinan daerah di Sumatera Selatan ataupun representasi WALHI di Sumatera Selatan.

Berdasarkan analisa peneliti, posisi NGO yang dimiliki oleh WALHI menjadi faktor utama penentuan sebagai aktor sekuritisasi. Kemudian dengan latar belakang organisasi sebagai organisasi lingkungan tertua dan terbesar di Indonesia, WALHI memiliki kekuatan sosial yang besar sehingga dapat mempengaruhi target audience dalam

upaya mengangkat isu gambut di Sumatera Selatan sebagai isu penting dalam keamanan. Selain itu WALHI sebagai NGO Lingkungan memiliki pengetahuan mendalam terkait isu lingkungan khususnya isu gambut sehingga aktor sekuritisasi memiliki kemampuan dan memiliki kapasitas dalam menyampaikan adanya ancaman serius terhadap ekosistem gambut. Terakhir, dedikasi terhadap lingkungan hidup yang dilakukan oleh WALHI berlangsung sejak lama, meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi ini yang mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan dan memperjuangkan kepentingan publik khususnya dalam isu gambut.

2. Speech Act

Speech act sendiri merupakan proses di mana aktor sekuritisasi melakukan orasi ataupun argumentasi untuk meyakinkan audience adanya ancaman terhadap reference object dimasa depan. Sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa gambut merupakan ekosistem yang unik karena karakteristik dan memiliki peranan penting sebagai pengatur dan pengendali pemanasan global, habitat flora dan fauna, bahkan bagi masyarakat sekitar adalah sumber pencaharian dan ekonomi. Hal inilah yang

disadari oleh WALHI sehingga perlu untuk terus diangkat dalam bingkai speech act terkait pentingnya melindungi dan menerapkan pengelolaan yang bijaksana. Berdasarkan analisa peneliti, terdapat empat aspek speech act yang selalu disampaikan oleh WALHI dalam mengangkat isu gambut di Sumatera Selatan sebagai isu penting dalam keamanan antara lain argumentasi tentang keunikan dan karakteristik gambut, peran penting bagi lingkungan dan masyarakat, ketimpangan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, kerusakan ekosistem gambut yang berdampak pada bencana ekologis. Secara singkat, speech act yang dilakukan oleh WALHI dalam membingkai isu gambut di Sumatera Selatan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Aspek	Aktor Sekuritisasi	Pernyataan
Karakteristik dan pentingnya ekosistem gambut	M. Hairul Sobri	Sumatera Selatan salah satu provinsi luasan gambut terbesar di Indonesia dan memiliki peran sebagai pengatur dan pengendali pemanasan global, sumber hidrologi dan tata kelola air, dan mencegah kebakaran lahan.
	Wahyu Pradana	Ekosistem gambut masuk dalam kategori ekosistem esensial.
Ketimpangan pengelola	Wahyu Pradana	Telah terjadi alih fungsi lahan gambut menjadi

an ekosistem gambut		lahan industri perkebunan yang berdampak pada kelestarian ekosistem gambut, sedangkan ekosistem esensial tidak boleh di eksploitasi secara masif.
	M. Hairul Sobri	Sejak tahun 2012, WALHI menolak alih fungsi lahan gambut yang dilakukan OKI Pulp and Paper karena dapat merusak gambut dan mempersempit lahan kelola masyarakat.
Dampak kerusakan ekosistem gambut	Hadi Jatmiko	Rusaknya ekosistem gambut menjadi sumber kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak 1990 dan berlangsung setiap tahunnya (Utomo 2015)
	Deni A. Nando	Rusaknya ekosistem gambut dengan membuka sekat kanal mengakibatkan rusaknya tata kelola air dan sumber banjir di lahan pertanian masyarakat sejak tahun 2009 (Nando 2018)

Berdasarkan analisa peneliti, Speech act yang disampaikan oleh aktor sekuritisasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan sekuritisasi karena di bagian inilah, aktor sekuritisasi akan meyakinkan target audience agar menyetujui isu yang diangkat sedang

terancam sehingga perlu dilakukan tindakan cepat dan tegas dengan menghasilkan keputusan politik atau kebijakan. Dengan melihat speech act yang disampaikan sebelumnya, aktor sekuritisasi memiliki kemampuan dalam menyampaikan pentingnya isu gambut untuk di lindungi dan diangkat sebagai isu keamanan baik kepada target audience maupun publik. Pertama, aktor sekuritisasi mampu menyampaikan pentingnya perlindungan terhadap ekosistem gambut dengan melihat luasan lahan gambut di Sumatera Selatan dan peran yang dimiliki gambut dengan baik.

Tentunya penyampaian ini berdasarkan analisa yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi sebelumnya yang lebih paham terkait isu lingkungan khususnya isu gambut dan dibuktikan dengan data pendukung yang ditemukan oleh peneliti. Kedua, aktor sekuritisasi mampu menyampaikan keprihatinan dan bentuk kepedulian terhadap ketimpangan pengelolaan ekosistem gambut yang ada di Sumatera Selatan. Aktor sekuritisasi melihat ketimpangan tersebut sebagai ancaman serius yang dapat merusak ekosistem gambut dan berdampak pada terjadinya bencana ekologis. Hal ini diperkuat dengan data yang dipublikasikan baik oleh WALHI, pemerintah, maupun

media lainnya terkait ketimpangan pengelolaan ekosistem gambut, kerusakan ekosistem gambut dan dampaknya pada bencana ekologis.

Aktor sekuritisasi juga dalam speech act, mampu menyampaikan dan mengedepankan kepentingan publik terutama yang terdampak kerusakan ekosistem gambut seperti kebakaran hutan dan lahan serta banjir. Tentu, informasi yang didapatkan oleh WALHI melalui investigasi yang mendalam yang kemudian disampaikan oleh aktor sekuritisasi. Dalam analisa peneliti, aspek-aspek inilah yang terus menerus disampaikan oleh aktor sekuritisasi di berbagai kesempatan baik langsung ke pemerintah sebagai target audience, forum-forum diskusi, wawancara di media cetak dan online maupun kampanye publik yang dilakukan oleh WALHI sendiri maupun organisasi lainnya. Selain itu, speech act harus terus disampaikan oleh aktor sekuritisasi sampai dengan isu gambut mendapat persetujuan atau semacam dukungan dari target audience sebagai isu penting yang terancam sehingga harus dilakukan tindakan cepat. Bukan hanya sampai mendapat persetujuan target audience, namun speech act harus dilakukan sampai tujuan penyelamatan ekosistem gambut

yang terancam dapat terwujud secara maksimal.

3. Existential Threat

Dalam analisa peneliti, existential threat yang diangkat dalam penelitian ini adalah ancaman kerusakan ekosistem gambut di Sumatera Selatan. Ciri-ciri ekosistem gambut yang sudah rusak adalah keringnya lapisan gambut sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Analisa peneliti ini diperkuat oleh data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan ditahun 2015 terdapat 426.863 hektar lahan gambut yang terbakar dengan sebagian besar berada di lahan perusahaan seluas 309.704 Ha (Wijaya, 2016).

Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem gambut yang seharusnya merupakan lahan basah yang mampu menyerap dan menyimpan kandungan air sekarang menjadi sumber kebakaran hutan dan lahan. Selain itu dampak yang dihasilkan oleh rusaknya ekosistem gambut ini adalah keluarnya gas karbon dioksida yang menyebabkan naiknya pemanasan global. Data terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan kerusakan ekosistem gambut di Sumatera

Selatan mengalami kerusakan dengan persentase mencapai 98 % (KLHK 2018).

4. Target Audience

Dalam penelitian ini, target audience atau pihak yang diyakinkan oleh aktor sekuritisasi adalah pemerintah pusat dalam hal ini adalah Presiden Jokowi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini didasari karena target audience itulah yang sebagai pemangku kebijakan dan pengambil keputusan atas berbagai kebijakan lingkungan hidup termasuk keberlangsungan perlindungan ekosistem gambut di Sumatera Selatan maupun di Indonesia.

Selain itu penentuan ini didasari atas kritik dari Wahyu Pradana selaku Manajer Kampanye Isu Pangan, Air dan Ekosistem Esensial yang menganggap pemerintah hari ini tidak menjadikan perlindungan lingkungan sebagai cara berpikir dasar dalam pengelolaan gambut. Menurutnya, pemerintah hanya memikirkan keuntungan ekonomi sebagai tujuan utama dan investasi sebagai cara berpikir dasarnya. Kemudian, pemerintah hari ini selalu mengeluarkan kebijakan yang tidak tepat terhadap gambut itu sendiri dan antara kapasitas pengetahuan yang dimiliki dengan solusi yang dikeluarkan pemerintah terkadang berbeda,

bukan hanya dalam konteks nasional, bahkan sampai ke internasional dan belum sepenuhnya mengetahui tentang gambut itu sendiri sehingga tidak memahami peran pentingnya sehingga lebih mementingkan ekonomi dengan membuka investor masuk daripada perlindungan lingkungan dalam tata kelola gambut (Pradana, personal communication. 2020, October 27).

5. Extraordinary Measure

Dalam analisa peneliti, Speech act yang disampaikan oleh WALHI sebagai sebuah organisasi lingkungan dalam upaya sekuritisasi gambut di Sumatera Selatan juga sejalan dengan extraordinary measure atau tindakan luar biasa yang dilakukan. Dalam upaya sekuritisasi ekosistem gambut di Sumatera Selatan sepanjang tahun 2014-2016, peneliti membagi ekstraordinary measure dalam tiga bagian yaitu dorongan adanya kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di tingkat nasional, terlibat dalam upaya penegakan hukum terhadap perusak ekosistem gambut, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem gambut. Secara singkat, extraordinary measure yang dilakukan oleh WALHI dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tanggal	Aktor	<i>Extraordinary Measure</i>
23 Mei 2015	Hadi Jatmiko	Mendesak pemerintah meneruskan kebijakan Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 mengingat masih banyak lahan gambut yang mengalami kerusakan.
25 Oktober 2015	Edo Rakhman	Mendesak pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut karena menganggap kebijakan ini akan membuka peluang korporasi melakukan kerusakan terhadap ekosistem gambut.
3 Februari 2015	M. Hairul Sobri	WALHI terlibat terhadap adanya penuntutan hukum terhadap PT. Bumi Mekar Hijau yang terbukti dengan sengaja merusak gambut dengan cara membakar lahan sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di tahun 2014 ke Pengadilan Negeri Palembang.
21 April 2016	M. Hairul Sobri	WALHI kembali mendorong pemerintah melayangkan gugatan banding atas putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan perkara pembakaran lahan gambut dengan sengaja yang dilakukan oleh PT. Bumi Mekar Hijau.
2016	Nur Hidayati	WALHI mengeluarkan buku

		dengan judul <i>Kelola Rakyat atas Ekosistem Gambut : Pelajaran Ragam Potret dan Argumen Tanding</i> yang berisikan hasil riset WALHI tentang pengelolaan ekosistem gambut oleh masyarakat yang dilakukan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.
22 Oktober 2016	Hadi Jatmiko	WALHI bersama Komunitas Masyarakat Pengelola Rawa dan Gambut (KOMPAG) dengan masyarakat desa Nusantara Kecamatan Tulung Selapan OKI mendeklarasikan diri menuju desa ekologi pada peringatan hari pangan sedunia 2016 dan melakukan pelatihan demplot dan pembuatan tata ruang desa.

Berdasarkan analisa peneliti extraordinary measure adalah kelanjutan speech act yang sampaikan oleh aktor sekuritisasi agar lebih meyakinkan target audience untuk menyetujui speech act yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi terus menerus. Dalam kaitannya extraordinary measure yang dilakukan, aktor sekuritisasi langsung menasar kepada tercapainya hasil sekuritisasi yaitu keputusan politik ataupun kebijakan. Extraordinary measure yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi yang bisa ditemukan peneliti banyak dilakukan melalui desakan, pernyataan sikap maupun

gagasan melalui media, namun tidak menutup kemungkinan aktor sekuritisasi juga melakukan extraordinary measure langsung dengan bertemu dengan pemerintah sebagai target audience di forum resmi ataupun surat resmi yang ditujukan kepada target audience. Tujuan dari extraordinary measure adalah memperkuat speech act yang dilakukan sebelumnya agar disetujui oleh target audience sebagai faktor terpenting keberhasilan sebuah upaya sekuritisasi.

Tentu extraordinary measure melalui desakan, pernyataan sikap, dan lainnya sangat bergantung pada kuat atau tidaknya speech act adanya ancaman terhadap ekosistem gambut sehingga perlu dilakukan tindakan cepat oleh pemerintah sebagai target audience. Kemudian, aktor sekuritisasi melakukan pembuktian terhadap speech act yang disampaikan sebelumnya yaitu kerusakan ekosistem gambut di Sumatera Selatan yang berdampak pada bencana ekologis disebabkan oleh adanya korporasi yang mengelola lahan gambut. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan WALHI dalam proses hukum yang berjalan dan menghasilkan keputusan pengadilan. Kemudian extraordinary measure yang dilakukan oleh WALHI, semakin memperkuat posisi sosial dan politik

organisasi dan memperkuat kepercayaan pemerintah terhadap aktor sekuritisasi yang memiliki upaya menyelamatkan ancaman terhadap ekosistem gambut di Sumatera Selatan. Sehingga baik speech act maupun extraordinary measure yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi, dapat disetujui dan mendapat dukungan oleh target audience sebagai faktor penting dalam keberhasilan sekuritisasi. Di samping aktor sekuritisasi tidak melupakan jati diri sebagai NGO yang berperan melayani kepentingan masyarakat dan sebagai nara hubung dengan pemerintah. Hal ini juga sebagai pembuktian dari speech act yang disampaikan oleh aktor sekuritisasi, bahwa masyarakat lebih arif dan bijaksana dalam mengelola gambut daripada korporasi. Harapannya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai hasil sekuritisasi lebih berpihak kepada masyarakat agar tujuan perlindungan ekosistem gambut di Sumatera Selatan dapat terwujud.

6. Hasil Sekuritisasi

Dengan berbagai speech act yang dilakukan oleh WALHI dalam sekuritisasi ekosistem gambut di Sumatera Selatan mendapatkan persetujuan atau semacam dukungan baik langsung maupun tidak langsung dan menghasilkan kebijakan

yang dikeluarkan pemerintah. Dengan melihat kerusakan ekosistem gambut yang terjadi di Sumatera Selatan, WALHI melakukan speech act dan extraordinary measure untuk mendorong adanya sekuritisasi ekosistem gambut sebagai isu penting dalam keamanan sehingga menghasilkan sebuah keputusan politik atau kebijakan. Pemerintah kemudian menerima isu tersebut sebagai ancaman, kemudian membuat atau mengubah beberapa kebijakan.

Tanggal	Kebijakan
13 Mei 2015	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015
13 Januari 2016	Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016
6 Desember 2016	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016

Berdasarkan hasil sekuritisasi di atas, maka dapat dikatakan sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi yaitu WALHI telah berhasil secara langsung maupun tidak langsung. Terlebih berdasarkan analisa peneliti, speech act dan extraordinary measure oleh aktor sekuritisasi mendapatkan persetujuan dan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan disampaikan bukan hanya bagi

Sumatera Selatan, bahkan skala nasional secara keseluruhan. Hal ini membuktikan bahwa speech act dan extraordinary measure aktor sekuritisasi besar pengaruhnya terhadap pengangkatan suatu isu menjadi isu keamanan. Hasil sekuritisasi ini menjadi faktor terpenting dalam upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh WALHI dalam rangka mengangkat isu gambut di Sumatera Selatan. energi dan petrokimia (Huaxin, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, sekuritisasi ekosistem gambut di Sumatera Selatan yang dilakukan oleh WALHI sudah cukup baik dengan melihat bahwa upaya ini merupakan awal adanya upaya sekuritisasi lanjutan dimasa mendatang. Meskipun upaya yang dilakukan belum terlalu banyak dan maksimal, namun sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor telah menghasilkan perubahan besar terhadap keberlangsungan lingkungan hidup khususnya perlindungan ekosistem gambut di Sumatera Selatan. Hal ini sejalan dengan analisis penulis yang mampu menjelaskan tahap maupun proses sekuritisasi yang dijabarkan dengan lengkap terkait apa saja yang dilakukan oleh WALHI meskipun sebenarnya di masa depan masih banyak yang harus

dilakukan. Inilah yang menjadi rekomendasi pada penelitian selanjutnya untuk menjelaskan upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor terkait perlindungan ekosistem gambut di Sumatera Selatan pasca tahun 2016 maupun menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah pasca adanya sekuritisasi yang dilakukan oleh WALHI pasca tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, Wendi. "Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang: Mungkinkah Berhasil Dilakukan?" *Jurnal Hubungan Internasional Vol. 2, No. 1*, 2013: 1-6.
- Barry Buzan, et.al. *Security A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner Publishe, 1998.
- Cifor. *Country Rank by Peatland*. 18 Juni 2020. <https://www.cifor.org/global-wetlands/>.
- FoEI. *Indonesia: Friends of The Earth Indonesia*. 22 June 2020. <https://www.foei.org/member-groups/asia-pacific/indonesia>.
- Gambut, Pantau. *Lahan Gambut Menjaga Perubahan Iklim*. 20 Juni 2020. <https://www.pantaugambut.id/pelajariperan-penting-lahan-gambut/lahan-gambut-menjaga-perubahan-iklim>.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. *Studi dan Teori Hubungan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017.
- Hildy Teegen, Jonathan P, Suchil Vathani. "The Importance of Non

- Governmental Organizations (NGOs) in Global Government and Value Reaction : An International Business Research Agenda.” *Journal of International Business Studies*, 2004: 463-465.
- Hoffman, Andrew. “Sustainability: Essentials for Business.” Dalam *Role of Governments*, oleh Kanwalroop Kathy Dhanda Scott T. Young, 232. SAGE Publications, 2012.
- Hulme. “Adapting to climate change: is there scope for ecological management in the face of a global threat?” *J Appl Ecol*, 2005: 784–794.
- KLHK. *Corrective Action Tata Kelola Gambut di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2018.
- Linggasari, Yohannie. *Pemerintah: Kebakaran Hutan Tahun Ini Lebih Parah dari 1997*. 21 October 2015. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151021155255-20-86387/pemerintah-kebakaran-hutan-tahun-ini-lebih-parah-dari-1997>.
- Murdiyarsa, Daniel, dan INN Suryadiputra. “Perubahan Iklim dan Peranan Lahan Gambut.” *wetland.or.id*. 2001. The Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia.
- Nando, Deni Arian. *Ekosistem Gambut di Desa Belanti: Wilayah Budidaya, tapi Tak Bisa Diolah*. 21 February 2018. <https://www.pantaugambut.id/cerita/ekosistem-gambut-di-desa-belanti-wilayah-budidaya-tapi-tak-bisa-diolah>.
- Nugraha, Indra. *Walhi: Berikut Korporasi-korporasi di Balik Kebakaran Hutan dan Lahan Itu*. 6 October 2015. <https://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasi-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu/>.
- Özcan, Sezer. “Securitization of Energy through the lenses of Copenhagen School.” *Orlando International Conference, 21-23 March, 2013, West East Institute*. Orlando: The 2013 WEI International Academic Conference Proceedings , 2013. 9.
- Pradana, W. (2020, October 27). Sekuritisasi Ekosistem Gambut Sumatera Selatan bersama Manager Kampanye Ekologi Esensial WALHI. (W. Saputra, Pewawancara)
- Quere, Corrine L, Nighel Hawtin, dan D. Van Vuuren. “Global Carbon Budget 2018.” *Global Carbon Project*. 2018. <http://globalcarbonproject.org/carbonbudget/index.htm>.
- Ramadhannanda, Krishna. “Kegagalan Bantuan USAID untuk Ethiopia dalam Program “Villagization” (2010-2014).” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2017.
- Ramadhan, Muhammad. “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Restorasi Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.” *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan IPB*, 2017: 62.
- Sayyidati, Adibah. “Isu Pemanasan Global dalam Pergeseran Paradigma

- Keamanan pada Studi Hubungan Internasional .” *Jurnal Hubungan Internasional IDF*, 2016: 7.
- Scott T. Young, Kanwalroop Kathy Dhanda. “Role of Governments and Non Governmental Organizations.” Dalam *Sustainability: Essentials for Business*, oleh Kanwalroop Kathy Dhanda Scott T. Young, 231. SAGE Publications, 2012.
- Sipongi. “Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2020.” *sipongi.menlhk.go.id*. 2020.
[http://sipongi.menlhk.go.id/pdf/luas_ kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/pdf/luas_kebakaran).
- Sobri, M. H. (2020, October 22). Sekuritisasi Ekosistem Gambut Sumatera Selatan bersama Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan (W. Saputra, Pewawancara)
- Triyono, Agus, dan Havid Vebri. *Cegah kebakaran, izin konsesi lahan gambut distop*. 29 October 2015.
<https://fokus.kontan.co.id/news/ce-gah-kebakaran-izin-konsesi-lahan-gambut-distop>.
- Tuijil, Peter Van. “NGO's and Human Right : Sources Justice and Democracy.” *Journal of International Affrair*, 1999: 495.
- Utomo, Yunanto Wiji. *Kabut Asap Kebakaran Hutan, Setengah Abad Kita Abai*. 14 September 2015.
<https://sains.kompas.com/read/2015/09/14/16272971/Kabut.Asap.Keba-karan.Hutan.Setengah.Abad.Kita.A-bai?page=all>.
- WALHI. *Visi dan Misi*. 15 October 2020.
<https://www.walhi.or.id/visi-dan-misi>.
- World Bank Group. *Krisis Kebakaran dan Asap Indonesia*. 25 November 2015.
<https://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/indonesias-fire-and-haze-crisis>.